

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 2014 - 2018

Anggi Priandita Putra ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Sunarti ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

e-mail : ¹⁾ anggiprian457@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of inflation, Gross Regional Domestic Product, Total Population on Regional Tax Revenues of Central Java Province 2014 - 2018. This study uses a sample type of nonprobability sampling used in this study is saturated sampling or often called a census, then The sample in this study is all of the population used in this study as many as 35 which are all districts and cities in Central Java Province consisting of 29 districts and 6 cities using the Stakeholder theory. The type of data used in this study is secondary data. The results of this study indicate that the significance value of inflation is $0.880 > 0.05$, it can be explained that inflation has no effect on local tax revenues. The significance value of Gross Regional Domestic Product (PDRB) is $0.000 < 0.05$, it can be explained that the GRDP has a significant effect on Regional Tax Revenue. The significance value of Total Population is $0.000 < 0.05$, it can be explained that Total Population has a significant effect on Local Tax Revenue. The results of the Determination Coefficient show an Adjusted R Square of 0.635, the effect of the independent variable, namely inflation, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Total Population on Local Tax Revenues by 64%, while the rest ($100\% - 64\%$) = 36% is influenced by other variables not researched.

Keywords: *Inflation, Gross Regional Domestic Product (PDRB), Total Population and Local Taxes.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan penerimaan pajak daerah menurut Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 mencapai Rp. 12.143.880.528.000 dari target penerimaan selama setahun sebesar Rp. 11.857.219.024.000. Selsih kurang atau lebihnya realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 286.661.504.000 atau 2,42%. Fenomena yang telah dipaparkan terdapat dua pernyataan yang bertolak belakang, pada satu sisi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berhasil memenuhi target yang ditentukan bahkan melebihi target, pada sisi yang lain faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka penerimaan pajak daerah perlu diketahui teori-teori yang melatarbelakangi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diungkapkan Ghozali dan Chariri (2007:409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya. Menurut

Huang dan Kung (2017), teori stakeholder menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. *stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki 10 (sepuluh) hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* yang akan mempengaruhi kinerja pemerintahan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu wilayah tertentu, dalam kurun waktu satu tahun. Ada dua jenis penghitungan PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku (*current year price*) dan atas dasar harga konstan (*base year price*). Menurut harga berlaku artinya nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga-harga ikut dihitung dan menurut harga konstan artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan, dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (terus menerus), yang diukur dalam satuan persen. Dalam teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*demand*), sehingga jumlah uang yang beredar dimasyarakat banyak. Kelebihan permintaan (*demand*) tersebut disebabkan oleh jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat jumlahnya sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Oleh karena jumlah barang yang sedikit dan terjadi kelangkaan barang tersebut, maka menyebabkan harga barang menjadi naik.

Jumlah penduduk yaitu jumlah manusia yang menempati wilayah di Provinsi Jawa Tengah menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula.

Penelitian yang dilakukan Chintia dan Susilo (2016) menunjukkan bahwa untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas (PDRB (X1) Inflasi (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) terhadap Pajak Daerah dilakukan dengan pengujian *t-test*. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah yaitu PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk.

Penelitian yang dilakukan Dian (2016) menunjukkan hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan per kapita (PDRB) berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa meningkatnya PDRB

akan berpengaruh meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kedua, hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa banyaknya jumlah penduduk belum tentu akan meningkatkan pajak daerah karena tidak semua penduduk pada usia produktif 15 - 64 tahun memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, terutama dalam ruang lingkup pembayaran pajak daerah. Ketiga, hasil penelitian ini membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa dampak yang ditimbulkan inflasi di provinsi Bengkulu adalah positif dan dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan syarat inflasi yang terjadi masih ringan di bawah 10 persen, dengan tingkat inflasi yang terjadi diasumsikan sama untuk seluruh kabupaten dan kota.

Penelitian yang dilakukan Yohan, dkk (2016) menunjukkan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember. Tingkat inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan Caesar, dkk (2019) menunjukkan variabel PDRB dalam penelitian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dengan nilai signifikansi diatas 0,05. Variabel Jumlah Penduduk dalam penelitian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dengan nilai signifikansi diatas 0,05. Variabel Inflasi dalam penelitian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari dengan nilai signifikansi diatas 0,05.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah terletak pada studi kasus, dimana penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan penelitian yang dilakukan Chintia dan Susilo (2016) di Kabupaten Madiun. Dian (2016) dilakukan penelitian di Provinsi Bengkulu. Yohan, dkk (2016) dilakukan penelitian di Kabupaten Jember. Caesar, dkk (2019) dilakukan penelitian di Kota Kendari, perbedaan penelitian dari segi metode penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan Caesar, dkk (2019) menggunakan metode kausal komparatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan mengenai beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penulis mengambil judul **“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014 - 2018”**

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah 2014 – 2018. 2) Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah 2014 - 2018. 3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah 2014 – 2018.

TINJUAN TEORI

Teori Stakeholder

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori *Stakeholder*. Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya. Menurut Huang dan Kung (2017), teori stakeholder menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. *stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas, atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun bagian yang memiliki 10 (sepuluh) hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* yang akan mempengaruhi kinerja pemerintahan.

Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah Pajak daerah dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.

Inflasi

Menurut Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. (Meita dan Wardoyo, 2016: 1).

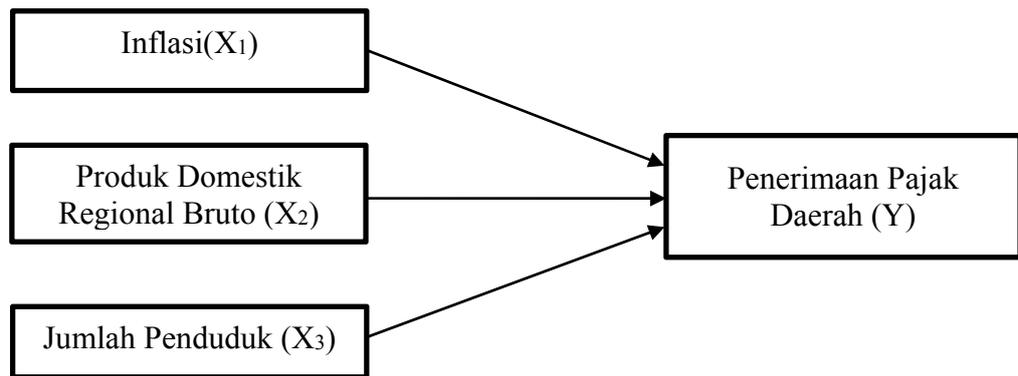
Produk Domestik Regional Bruto

Badan Pusat Statistik (2017) mengemukakan pengertian “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi”.

Jumlah Penduduk

Menurut Penduduk merupakan salah satu modal awal dalam perkembangan ekonomi. Pertumbuhan atau penambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tingkat kelahiran dan urbanisasi. Jumlah penduduk yaitu jumlah manusia yang menempati wilayah di Provinsi Jawa Tengah menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan skema kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel bebas: Inflasi (X_1), Produk Domestik Regional Bruto (X_2), dan Jumlah Penduduk (X_3).
2. Variabel terikat: Penerimaan Pajak Daerah (Y).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Inflasi adalah Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Karena berlaku secara umum, kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan itu meluas sehingga mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

H1 : Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keterkaitan dengan PDRB mengenai penerimaan pajak daerah, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut,

H2 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk mengenai penerimaan pajak daerah, hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi dan

jumlah pajak daerah yang akan diterima juga akan semakin tinggi. Pemerintah tidak hanya mendapatkan penerimaan pajak daerah yang tinggi, tetapi penduduk juga mendapatkan timbal balik dari pemerintah berupa fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak.

H3 : Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan menggunakan populasi, sampel, dan menggunakan metode kuantitatif sebagai alat untuk menggumpulkan data. Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah seluruh data anggaran, realisasi, inflasi, produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah 2014 - 2018 yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini seluruh dari populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data anggaran, realisasi, inflasi, produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk dari tahun 2014 - 2018 di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis *non probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sering disebut juga sensus.

ANALISIS DATA

Analisis Deskriptif

Inflasi

Inflasi diukur dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014-2018 yang diteliti menunjukkan nilai minimum sebesar - 7,46 atau 4 %, nilai maksimum sebesar 2,14 atau -1 % dan nilai rata-rata sebesar -1,0587 atau 1% . Nilai rata-rata ini menggambarkan bahwa dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014-2018 mendekati nilai maksimum inflasi, hal ini berarti bahwa kenaikan Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n) sebesar 2,14 atau -1%, menunjukkan hal yang tidak baik karena inflasi tidak dapat dikendalikan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB diukur dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014-2018 yang diteliti menunjukkan nilai minimum PDRB sebesar Rp. 4. 992.112 atau sebesar 15,42%, nilai maksimum PDRB sebesar Rp. 131.317.631 atau sebesar 18,69 % dan nilai rata-rata sebesar Rp. 24. 298.318 atau sebesar 17,01%. Nilai rata-rata ini menggambarkan bahwa dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014-2018 mendekati nilai maksimum kenaikan PDRB, ini menunjukkan hal yang baik karena jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi, dan tentu semakin menggambarkan

tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah (*region*).

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk diukur dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014 - 2018 yang diteliti menunjukkan nilai pertumbuhan minimum sebesar 320 jiwa atau 1 %, nilai maksimum pertumbuhan penduduk sebesar 28620 jiwa atau sebesar 2 % dan nilai rata-rata sebesar 7008 jiwa atau sebesar 1 %. Nilai rata-rata ini menggambarkan bahwa dari Jumlah Penduduk dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014 - 2018 yang diteliti menunjukkan nilai pertumbuhan penduduk yang mendekati nilai minimum, ini menunjukkan hal yang kurang baik karena jumlah penduduk yang bertambah cukup rendah maka meningkatkannya penerimaan pajak daerah juga rendah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014 - 2018 yang diteliti menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 22.107.435.949,00 atau sebesar 23,82 %, nilai maksimum sebesar Rp. 1.331.817.746.450,00 atau sebesar 27,92 %, dan nilai rata-rata sebesar 98.461.621.967,83 atau sebesar 25,31 %. Nilai rata-rata ini menggambarkan bahwa Pajak Daerah dari 175 seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, periode 2014-2018, mengalami kenaikan mendekati nilai maksimumnya, artinya pendapatan suatu daerah mengalami kenaikan dan tentu saja ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang semakin meningkat.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,997, 0,559, 0,559) > 0,10 <i>VIF</i> (1,003, 1,788, 1,789) < 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Uji autokorelasi	<i>p value</i> 0,193 > 0,05	Tidak terjadi autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	<i>p value</i> (0,929, 0,102, 0,501) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji normalitas	<i>p value</i> 0,200 > 0,05	Residual berdistribusi normal

Sumber : data diolah 2020

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menguji analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficients	Nilai t	Sig.
(Constant)	-65227116962	-5,069	,000
X ₁	513533453	,151	,880
X ₂	3919	8,962	,000
X ₃	9842868	5,284	,000
F hitung	101,941		0,000
Adj. R Square	0,635		

Sumber : data diolah 2020

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = -65227116962 + 513533453 (X_1) + 3919 (X_2) + 9842868 (X_3) + e$$

Keterangan:

a : Berdasarkan hasil analisis menunjukkan hasil besarnya nilai konstanta dengan parameter negatif sebesar -65227116962. Hal ini berarti bahwa Penerimaan Pajak Daerah tetap meningkat variabel Inflasi (X₁), Produk Domestik Regional Bruto (X₂), Jumlah Penduduk (X₃) dianggap konstan.

*b*₁ : 513533453, Variabel Inflasi (X₁) berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah (Y), artinya jika Inflasi meningkat sebesar 1% maka Y (Pajak Daerah) akan menurun sebesar 513533453, sebaliknya jika Inflasi menurun sebesar 1 % maka Y (Pajak Daerah) akan meningkat 513533453.

*b*₂ : 3919, Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X₂) berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah (Y), artinya jika PDRB meningkat sebesar 1% maka Y (Pajak Daerah) akan meningkat sebesar 3919, sebaliknya jika PDRB menurun sebesar 1% maka Y (Pajak Daerah) akan menurun sebesar 3919.

*b*₃ : 9842868, Variabel Jumlah penduduk (X₃) berpengaruh positif terhadap Pajak Daerah (Y), artinya jika Jumlah Penduduk meningkat sebesar 1% maka Y (Pajak Daerah) akan menurun sebesar 9842868, sebaliknya jika Jumlah Penduduk menurun sebesar 1% maka Y (Pajak Daerah) akan meningkat sebesar 9842868.

Uji t

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 0,151 dengan *p-value* sebesar 0,880 atau lebih dari 0,05 artinya H_a ditolak atau H₀ diterima. Variabel Inflasi (X₁) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 8,962 dengan *p-value* sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 artinya H_a diterima atau H₀ ditolak. Variabel produk domestik regional bruto (X₂) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,284 dengan *p-value* sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 artinya H_a diterima atau H₀ ditolak. Variabel jumlah penduduk (X₃) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Uji F

Hasil Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 101,941 dengan nilai signifikansi (p. value) sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model tepat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R^2) untuk model ini adalah sebesar 0,635 artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independen Inflasi (X_1), Produk Domestik Regional Bruto (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) terhadap Pajak Daerah (Y) sebesar 64 %, sedangkan sisanya ($100\% - 64\%$) = 36 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain diluar variabel yang diteliti, misalnya Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Perusahaan, Investasi dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Inflasi diperoleh nilai p -value signifikansi sebesar $0,880 > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Inflasi terhadap Pajak Daerah. Penyebab terjadinya Inflasi (X_1) tidak berpengaruh terhadap Pajak Daerah bahwa ketika inflasi itu naik secara terus menerus, masyarakat akan tetap membayar pajak daerah dikarenakan pajak dapat bersifat memaksa. Meskipun harga barang dan jasa naik karena inflasi yang membuat pendapatan mereka berkurang namun ini tidak berakibat pada penerimaan pajak daerah (Arianto, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sania, dkk, 2018) yang menyatakan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Lumy, dkk, 2018) yang menyatakan variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB diperoleh nilai p -value signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya nilai signifikan menyatakan bahwa PDRB (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y). Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Helti, 2010). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah (Dian, 2016). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah (Muslim, dkk, 2019).

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk diperoleh nilai p -value signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka nilai signifikan menyatakan bahwa Jumlah Penduduk (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah (Y). Hal ini berarti semakin tinggi Jumlah Penduduk maka Pajak Daerah akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan syarat dalam pemungutan pajak diantaranya harus adanya subjek pajak. Meningkatnya jumlah penduduk,

maka akan semakin bertambah jumlah penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak. Dilihat dari data penelitian jumlah penduduk sudah baik yang artinya sebagai subjek pajak, maka penduduk akan mengeluarkan penghasilannya untuk membayar pajak dan akan semakin banyak juga pajak daerah yang diterima oleh pemerintah (Sania, dkk. 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sania, dkk, 2018) yang menyatakan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Sari, 2016).

KESIMPULAN

1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETERBATASAN

1. Keterbatasan penggunaan variabel yang diteliti hanya menggunakan Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk
2. Jumlah tahun yang diteliti hanya dalam rentan waktu 5 (lima) tahun yaitu 2014 – 2018.
3. Penelitian ini hanya menggunakan alat ukur berupa angket saja, tanpa diikuti observasi atau wawancara yang mendalam terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah oleh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk.
4. Pengambilan data hanya diperoleh berdasarkan satu sumber dan tidak dapat diperoleh dari sumber lain yaitu pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hendaknya lebih mengoptimalkan lagi pos-pos penerimaan pajak daerah. Usaha peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi daerah yang berbasis pada kekuatan lokal untuk pengembangan komoditas unggulan. Berkembangnya perekonomian akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat dan dapat menekan laju inflasi serendah-rendahnya yang diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah tahun penelitian dengan tentang waktu lebih dari 5 (lima) tahun agar hasil yang diperoleh bisa lebih akurat dan tiak bias.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lagi variabel-variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan melakukan olah data dengan metode analisa data yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- .2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- .2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- A Chariri dan Imam Ghozali. 2007. "Teori Akuntansi". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT.Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Produk Domestik Regional Bruto, Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto*. BPS. Indonesia
- Caesa, dkk. 2019. "Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Tingkat Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 2. No. 3
- Chintia dan Susilo. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah".
- Dian Purnama. 2016. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak daerah di provinsi bengkulu". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6, No.1, Hal 75-84.
- Ghozali, Imam. (2016, 2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, dkk. 2018. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota DiProvinsi Jawa Tengah". Vol. IX, No 2.
<http://repositori.usu.ac.id>
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/03/060000569/pengertian-inflasi-indikator-dan-pengelompokan?page=all>.
- Huang, C.L., & Kung, F.H. 2010. Drivers of Environmental Disclosure and Stakeholder Expectation: Evidence From Taiwan. *Journal of Business Ethics*. Vol 96, No.3.
- INDONESIA, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Latumaerissa, Julius R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Medika
- Lumy, dkk. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Pembangunan Ekonomidan Keuangan Daerah* Vol.19 No.6
- Mardiasmo. (2016, 2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016, 2018*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Nasution, dkk. 2012."Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang"
- Novalistia, Rizka Lutfita (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014). Universitas Pandanaran Semarang.

- Panjaitan, dkk. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 21, No 3.
- Sania, dkk. 2018. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah”. Vol. IX No. 2.
- Saputra, dkk. 2014. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)”. Jurnal Perpajakan Vol. 3, No. 1.
- Sukmawati. 2018. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan pajak daerah di kota medan”
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yohan, Badjuri dan Zainuri. 2016. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember”.